

Kebijakan Moneter Dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19

M. Veri Galih Nugroho Saputro¹, Miftahul Ghulam Al Fakhri²

^{1,2}Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

Email : verigalih202@gmail.com, miftahulalfakhri@gmail.com

Article Info	Abstract
Article history: Received May 25, 2024 Revised May 30, 2024 Accepted June 15, 2024 Available online June 16, 2024 *Corresponding author email : verigalih202@gmail.com Keywords: Monetary Policy, Recovery, Economy, Covid-19.	Introduction/Main Objectives: The Covid-19 pandemic, including Indonesia, has disrupted the world economy. In the world, Covid-19 has eroded the economy by USD 8.8 trillion or 9.7%. Bank Indonesia, the central bank that regulates monetary policy, has restored the economic problems that have occurred by collaborating with the government. This study aims to determine monetary policy in economic recovery during the Covid-19 pandemic. Research Methods: The method used in this research is qualitative with literature study techniques sourced from articles, books, journals, or other related sources. Finding/Results: The results of this study indicate that the monetary policies implemented by Bank Indonesia include accommodative macroprudential policies, rupiah exchange rate stability policies, SBN purchase policies from the secondary market, policy interest rate reductions (BI7DRR), and social assistance distribution policies (bansos) with the government. Conclusion: From several policies, it can be concluded that Bank Indonesia is serious in dealing with economic problems during the Covid-19 pandemic. So it is hoped that with the right Monetary Policy, the economy in Indonesia will improve.
Page: 44-53	Journal of Economics and Social Sciences (JESS) with CC BY license. Copyright © 2024, the author(s)

PENDAHULUAN

Munculnya pandemi Covid-19 mempengaruhi semua aspek kehidupan di setiap negara. Pandemi ini menimbulkan tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah dari berbagai negara segera mengambil kebijakan dengan memberlakukan karantina, lockdown atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai tindakan pencegahan untuk mencegah penyebaran virus corona ([Hastuti et al., 2020](#)). Dengan adanya pandemi Covid-19, sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang paling terdampak yang mengakibatkan perekonomian dunia tergerus sebesar USD 8,8 triliun atau 9,7% ([Pakpahan & Yoshanty, 2022](#)).

Di Indonesia sendiri, pandemi Covid-19 telah menyebabkan perekonomian menjadi terganggu. Hal ini terjadi karena kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah pandemi Covid-19 tidak sejalan dengan pertumbuhan perekonomian ([Putri & Rizal, 2022](#)). Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pandemi ini adalah pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Kebijakan ini memang cukup tepat untuk mencegah penularan pandemi Covid-19. Namun, hal tersebut mengakibatkan banyak pekerjaan menjadi terhalang atau terhambat, bahkan membuat banyak perusahaan berhenti beroperasi, karena kebijakan tersebut. Dengan banyaknya permasalahan ekonomi yang terjadi, maka pemerintah Indonesia memiliki solusi untuk mengatasinya yaitu dengan mengeluarkan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter untuk menggerakkan perekonomian dan menjaga stabilitas perekonomian, khususnya bagi pelaku usaha di sektor riil maupun sektor keuangan ([Hafizd, 2020](#)).

Menurut APBN, kebijakan fiskal adalah penyesuaian pendapatan dan belanja pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang telah ditetapkan. Kebijakan ini menentukan besarnya belanja yang akan dikeluarkan pemerintah dan pengeluaran pemerintah ini dapat memberikan dorongan bagi dunia usaha. Namun, kebijakan fiskal saja tidak cukup untuk mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia, diperlukan kebijakan moneter juga untuk mengatasi permasalahan tersebut. Kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral dalam bentuk pengaturan persediaan uang untuk mencapai tujuan tertentu ([Sudirman, 2017](#)). Bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia juga perlu bersinergi dengan pemerintah untuk memaksimalkan semua usaha mereka dalam mengatasi masalah ekonomi di Indonesia. Bank Indonesia sendiri terus melakukan koordinasi untuk mengurangi beban kepada masyarakat, agar masyarakat Indonesia bisa bertahan di masa pandemi ini. Bank Indonesia juga terus melakukan langkah-langkah memperkuat stabilitas di pasar valas, pasar keuangan, bersama pemerintah dan OJK dalam penyediaan pembiayaan di perbankan ([Samsul et al., 2021](#)).

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam mengendalikan besaran moneter untuk mencapai stabilitas ekonomi makro yang tercermin dalam stabilitas harga, membaiknya output riil, dan banyaknya lapangan kerja. Ketika suatu perekonomian mengalami penurunan bahkan krisis, pemerintah dapat menggunakan kebijakan moneter yang dapat menopang fluktuasi perekonomian. Oleh karena itu, beberapa negara telah menerapkan kebijakan moneter yang lebih mengutamakan pada sasaran tunggal, yaitu

stabilitas harga (Sriyono, 2013). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan moneter dalam pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik studi kepustakaan yang dikumpulkan berdasarkan jurnal nasional dan internasional yang berkaitan dengan kebijakan moneter dalam pemulihan ekonomi pada masa Pandemi Covid-19. Tinjauan pustaka adalah kompilasi, klasifikasi, dan evaluasi atas apa yang telah ditulis peneliti lain mengenai topik tertentu. Data diperoleh melalui pembacaan, pengkajian dan analisis berbagai publikasi, baik dalam bentuk dokumen, jurnal, data publikasi Kementerian Keuangan, maupun situs resmi yang memuat informasi yang relevan dengan penelitian. Menggunakan studi Pustaka (Sugiono, 2010).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Moneter dan Pandemi Covid-19 di Indonesia

Kebijakan moneter merupakan kebijakan bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Dalam prakteknya, perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan tersebut adalah stabilitas ekonomi makro yang antara lain dicerminkan oleh stabilitas harga (rendahnya laju inflasi), membaiknya perkembangan output riil (pertumbuhan ekonomi), serta cukup luasnya lapangan atau kesempatan kerja yang tersedia (Warjiyo, 2017). Kebijakan moneter adalah strategi yang dilakukan oleh bank sentral masing-masing negara, jika di Indonesia (Bank Indonesia) untuk memelihara stabilitas mata uang rupiah melalui pengendalian jumlah uang beredar (JUB) di masyarakat dan suku bunga bank. Kebijakan moneter juga memiliki tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan rupiah, hal ini sesuai dengan yang tertuang di UU No. 3 tahun 2004 dan UU No.6 tahun 2009. Tujuan akhir dari kebijakan moneter adalah untuk menjaga dan menjaga kestabilan nilai rupiah yang salah satunya mengarah pada tingkat inflasi yang rendah dan stabil (Anshar, 2022).

Kebijakan moneter merupakan bagian integral dari kebijakan ekonomi makro, yang pada umumnya dilakukan dengan mempertimbangkan siklus kegiatan ekonomi, sifat perekonomian suatu negara tertutup atau terbuka, serta faktor-faktor fundamental ekonomi lainnya. Kebijakan moneter terdiri dari kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan ekspansif dilakukan dengan cara meningkatkan jumlah uang beredar untuk mendorong kegiatan ekonomi, sedangkan kebijakan kontraktif bersifat sebaliknya (Rizal & Humaidi, 2019; Sukirno, 2019).

Covid-19 merupakan jenis virus korona terbaru yang awalnya ditemukan di Wuhan, Cina. Penyakit ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Penyebaran Covid-19 yang cukup mudah dan cepat serta dampak yang mengerikan bagi penderita dengan penyakit bawaan mengakibatkan virus ini tergolong berbahaya (Bainus & Rachman, 2020). Kebanyakan orang yang terinfeksi virus Covid-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan

husus. Namun, beberapa akan menjadi sakit parah dan memerlukan perhatian medis. Orang yang sudah lanjut usia dan mereka memiliki kondisi medis seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, penyakit pernapasan kronis, atau kanker lebih mungkin terserang penyakit serius. Siapa pun bisa tertular Covid-19 dan menjadi sakit parah atau meninggal pada usia berapa pun. Sedikitnya 23.851 orang tercatat positif mengidap virus corona di Indonesia. Dari 6.057 pasien yang berhasil sembuh, 1.473 di antaranya tidak dapat bertahan. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan angka infeksi dan kematian virus corona tertinggi ([Kementerian Kesehatan, 2020](#)).

Indonesia merupakan salah satu negara yang terdampak virus corona dengan angka kematian sebesar 7,8%, salah satu yang tertinggi di dunia. Akibat dampak Covid-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat. Hal ini dibuktikan dengan data ([Badan Pusat Statistik, 2022](#)) yang menunjukkan penurunan sebesar 5,32% dari tahun 2020 ke tahun 2021. Menurunnya pertumbuhan ekonomi Indonesia disebabkan oleh berkurangnya konsumsi rumah tangga, dan penurunan jumlah investasi di berbagai sektor perekonomian ([Indayani & Hartono, 2020](#)).

Kebijakan Moneter dalam Pemulihan Ekonomi Indonesia pada Masa Pandemi Covid-19

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah Indonesia melakukan pendekatan yang sigap dan prudent. Agar dampak pandemi pada sektor perekonomian tidak semakin memburuk, Pemerintah mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter. Pada bidang moneter, kebijakan-kebijakan yang diambil Bank Indonesia dan Pemerintah adalah sebagai berikut.

1. Kebijakan Makropudensial Akomodatif

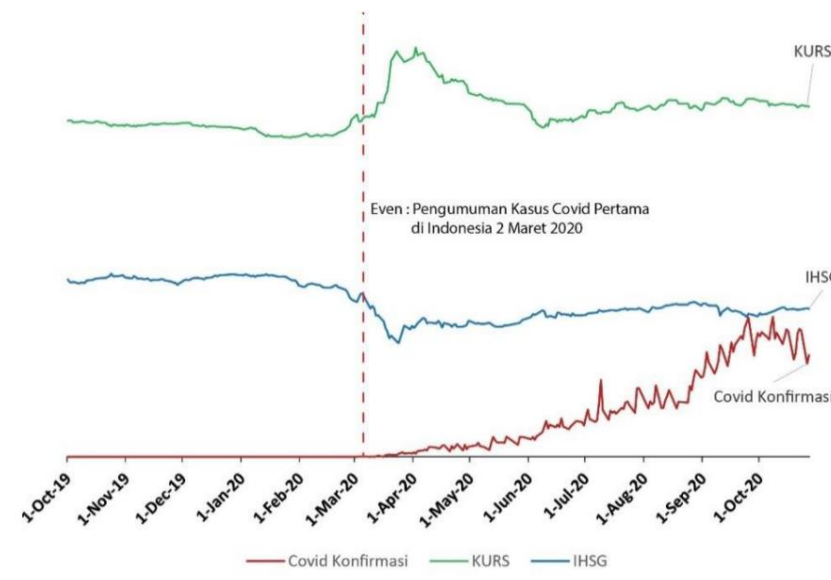
Dalam studi yang dilakukan oleh Swiss BIS, kebijakan makropudensial diartikan sebagai kebijakan yang ditujukan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sistemik ([Yonatan, 2015](#)). Kebijakan makropudensial merupakan kebijakan yang tujuan utamanya adalah menjaga stabilitas seluruh sistem keuangan dengan pmbatasan peningkatan risiko sistematis. Kebijakan makropudensial ini baru diperbaharui pada tanggal 20 Agustus 2018, dengan perkiraan permintaan pembiayaan real estat akan terus meningkat dari tahun ke tahun. Bank Indonesia telah mengambil kebijakan makropudensial sejak awal, sebelum merebaknya infeksi virus corona di Indonesia, karena perekonomian global saat itu sedang kurang baik sehingga menyebabkan perlambatan perekonomian global ([Karin et. al., 2022](#)). Hal inilah yang menyebabkan Bank Indonesia mengambil langkah penerapan langkah makropudensial untuk mencegah krisis.

Pada triwulan I taun 2020, sebelum pandemi Covid-19 melanda indonesia, bank Indonesia menerapkan kebijakan pelonggaran ketentuan *loan to valueratio* (LTV), rasio intermediasi makropudensial (RIM), serta penurunan nilai tukar rupiah GWM, dalam rangka memitigasi dampak Covid-19. Kebijakan ini dilakukan untuk memfasilitasi perbankan dalam pembiayaan dunia usaha dan perekonomian masyarakat. Kebijakan ini terus berjalan hingga triwulan ke-3 tahun 2020 dengan sedikit penambahan.

2. Kebijakan Stabilitas Nilai Tukar Rupiah

Uang memiliki fungsi sebagai alat tukar yang bertujuan untuk mempercepat pertukaran barang dan jasa. Jika bursa dapat beroperasi dengan cepat, pertumbuhan produksi dan konsumsi akan meningkat sehingga semakin mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia pihak yang bertanggung jawab dalam peredaran uang adalah Bank Indonesia. Menurut UU No. 3 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 1999 pada pasal 7 dinyatakan bahwa Bank Indonesia memiliki tujuan untuk menjaga kestabilan Rupiah, dengan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian (Graziani, 2019). Jika *supply* uang terlalu tinggi terhadap nilai pertumbuhan sektor riil, maka akan terjadi inflasi. Sebaliknya, jika *supply* uang beredar rendah, maka sektor riil tidak dapat berjalan dengan cepat, sehingga terjadi perlambatan ekonomi (Astuti & Eddyono, 2021). Akibat ketidakpastian pasar keuangan global dan akibat dari penyebaran pandemi Covid-19, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah selama pandemi Covid-19 menghadapi beberapa tantangan yang dapat menyebabkan dampak global. Hal ini menyebabkan meningkatnya penghindaran risiko (*risk-averse*) perilaku di kalangan investor. Banyak uang yang beredar pada tahun 2020 yang cukup tinggi di banding tahun-tahun sebelumnya, kenaikannya mencapai +700 triliun. Fenomena ini bertepatan dengan penurunan *BI rate* yang dilakukan BI pada tahun 2019-2020.

Gambar 1. Respons Nilai Tukar dan IHSG terhadap Penemuan Kasus Covid di Indonesia Tahun 2018-2022



(sumber: Bank Indonesia, Kementerian Kesehatan, Bursa Efek Indonesia)

Meskipun nilai tukar tidak berpengaruh signifikan terhadap inflasi, namun nilai tukar menjadi salah satu instrumen penting dalam percepatan pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan stabilisasi yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia bersama

pemerintah bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan menempuh langkah yang sesuai dengan fundamental dan mekanisme pasar.

3. Kebijakan Pembelian SBN dari Pasar Sekunder

Pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dilakukan Bank Indonesia merupakan langkah mengatasi penurunan likuiditas uang akibat pandemi Covid-19 dengan menerapkan kebijakan akomodatif. Bank Indonesia akan melanjutkan komitmen dalam mendanai APBN 2020 dengan membeli SBN di pasar perdana sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Bank Indonesia, 2020). Guna menjaga stabilitas likuiditas keuangan dengan baik, SBN Bank Indonesia akan mendorong penyaluran kredit kepada dunia usaha dan pemulihan perekonomian nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Konferensi Pres SKB III bersama Gubernur Bank Indonesia menyatakan bahwa tidak mengorbankan, *at all cost*, sustainabilitas dalam jangka menengah panjang, dalam bentuk kesehatan, keuangan Pemerintah Indonesia, dan BI, yang merupakan fondasi penting bagi perekonomian Indonesia untuk terus tumbuh ke depan.

Kebijakan pembelian SBN dari pasar sekunder ini telah dilakukan oleh Bank Indonesia pada triwulan pertama pada 2020 dengan injeksi likuiditas yang mencapai Rp415,8 triliun. Likuiditas yang longgar dapat mempercepat pemulihan nasional. Kebijakan pembelian SBN ini merupakan sinergi yang sangat baik antara Bank Indonesia dan Pemerintah dalam mengatasi permasalahan ekonomi nasional. Ini terbukti dengan pembelian SBN sejak tahun 2020 hingga februari 2021 telah membuat likuiditas di Indonesia menjadi longgar (Gading et al., 2022).

4. Penurunan Suku Bunga Kebijakan (BI7DRR)

BI Rate yang saat ini menjadi *BI 7 day reverse repo rate* (BI7DRR) yang telah diganti sejak 19 Agustus 2016 lalu, merupakan kerangka operasi moneter yang dilakukan oleh bank Indonesia untuk menjaga kestabilan nilai mata uang rupiah. Nilai BI7DRR selalu di update oleh bank Indonesia setiap sebulan sekali. Penetapan nilai BI7DRR salah satunya mempertimbangkan harga barang dan jasa yang berlaku di masyarakat. Jika dirasa harga barang dan jasa secara agregat mengalami kenaikan (inflasi), maka BI7DRR akan dinaikkan. Kenaikan harga secara agregat ini dinilai akibat dari peredaran uang di masyarakat yang terlalu banyak dibanding dengan produksi barang dan jasa yang sedang berjalan. Sedangkan pada tahun 2020 Indonesia mengalami kesulitan dalam perekonomian, maka untuk mencapai pemulihan ekonomi nasional BI7DRR diturunkan (Nihayah & Rifqi, 2022).

Pada tahun 2021, Bank Indonesia menurunkan suku bunga sebesar 25 bps menjadi 3,50% setelah sebelumnya ada dinilai 3,75%. Keputusan tersebut merupakan pertimbangan dari perlunya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian pasar keuangan global. Selama tahun 2021 Bank Indonesia konsisten memberikan suku bunga BI-7Day-RR berada di 3,50%. Hal ini diharapkan dapat mendukung pembiayaan

perekonomian, karena likuiditas yang lebih rendah dan menurunnya nilai BI7DRR dapat berkontribusi untuk menurunkan suku bunga simpanan dan pinjaman modal kerja. Penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR) juga berdampak pada penurunan suku bunga perbankan dan imbal hasil SBN. Sehingga tingkat inflasi yang diharapkan dapat tercapai dan gangguan perekonomian akibat pandemi Covid-19 akan segera teratasi dengan pemulihan ekonomi nasional.

5. Kebijakan Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Bersama Pemerintah

Menurut Kementerian Sosial (2011), bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang ditujukan kepada masyarakat miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan kehidupannya secara wajar. Program bantuan sosial merupakan bagian dari program jaminan sosial yang menjadi bentuk realisasi tanggung jawab pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang peduli terhadap kondisi masyarakat miskin dan terlantar di tingkat bawah. Program ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Selain itu pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan ([Rahmansyah et, al., 2020](#)).

Adapun program yang diberikan oleh pemerintah antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) bersyarat untuk Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH merupakan program yang dibuat pemerintah sebagai usaha percepatan penanggulangan kemiskinan. Selanjutnya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang ditujukan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam bentuk non tunai yang dapat dibelanjakan bahan pangan di pedagang bahan pangan atau e-warung yang bekerja sama dengan bank. Kemudian untuk masyarakat yang terdampak PHK akibat pandemi, pemerintah menyediakan Kartu Prakerja dan untuk mendukung siswa, pemerintah menyediakan Kartu Indonesia Pintar (KIP) ([Fadhli & Fahimah, 2021](#)). Dalam pelaksanaan pemberian bantuan sosial, Bank Indonesia berkoordinasi dengan pemerintah memperkuat kebijakan dalam pelaksanaan uji coba digitalisasi bantuan sosial (bansos) serta optimalisasi dan percepatan penyaluran bantuan sosial.

Dengan beberapa kebijakan moneter di atas, Bank Indonesia mampu mengoptimalkan bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi Covid-19. Kebijakan moneter ini memiliki pengaruh secara signifikan terhadap penanganan masalah ekonomi di Indonesia pada masa pandemi Covid-19. Sehingga terlihat jelas bahwa Bank Indonesia serius dalam menghadapi masalah perekonomian di masa pandemi Covid-19 ([Rizal & Mukaromah, 2021](#)). Hal ini sejalan dengan penelitian Dewianawati, 2020 yang menyatakan bahwa kebijakan moneter justru berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penanganan Covid-19 ([Dewianawati, 2020](#)). Dan juga sejalan dengan penelitian Gading dan Steven, 2022 yang menyatakan bahwa Bank Indonesia serius dalam menghadapi masalah perekonomian di masa pandemi Covid-19 ([Gading et. al., 2022](#)).

KESIMPULAN

Bank Indonesia dalam memulihkan perekonomian di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengindikasikan beberapa kebijakan diantaranya kebijakan makropudensial akomodatif, kebijakan stabilitas nilai tukar rupiah, kebijakan pembelian SBN dari pasar sekunder, penurunan suku bunga kebijakan (BI7DRR), dan kebijakan penyaluran bantuan sosial (bansos) bersama pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia serius dalam menghadapi masalah perekonomian di masa pandemi Covid-19. Dari beberapa kebijakan tersebut dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia serius dalam menangani permasalahan ekonomi di masa pandemi Covid-19. Sehingga diharapkan dengan Kebijakan Moneter yang tepat, perekonomian di Indonesia akan semakin membaik.

REFERENSI

- Anshar, M. (2022). Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia Terhadap Perkembangan Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomidi Masa Pandemi Covid-19.
- Astuti, T. S., & Eddyono, L. W. (2021). Peran Bank Indonesia dan Pembangunan Hukum di Bidang Moneter dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(3), 393–411.
- Badan Pusat Statistik. (2022). Data Pertumbuhan Produk Domestik Bruto. <https://www.bps.go.id/>
- Bainus, A., & Rachman, J. B. (2020). Pandemi Penyakit Menular (Covid-19) Hubungan Internasional. *Intermestic: Journal of International Studies*, 4(2), 111–123.
- Bank Indonesia. (2020). Perkembangan Langkah-Langkah BI dalam Hadapi COVID-19. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/Perkembangan-Langkah-Langkah-BI-dalam-Hadapi-COVID-19.aspx>
- Dewianawati, D. (2020). Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter Terhadap Produktivitas Pelaku UMKM Melalui Variabel Mediasi Keberhasilan Penanganan Covid-19 (Studi pada Pelaku UKM di Kota Mojokerto). *JEBDEER: Journal of Entrepreneurship, Business Development and Economic Educations Research*, 4(1), 15–30.
- Fadhli, K., & Fahimah, D. A. N. (2021). Pengaruh Pendapatan, Pendidikan, dan Gaya Hidup Terhadap Kesejahteraan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Sosial Covid-19. *Jurnal Education and Development*, 9(3), 118–124.
- Gading, M. M., Steven, S., & Maulana, A. (2022). Analisis Kebijakan Moneter Bank Indonesia dalam Menangani Pandemi Covid-19. *Accounting Student Research Journal*, 1(1), 102–116.
- Graziani, J. V. (2019). Peran dan Fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Menurut UU No. 23 Tahun 1999 Jo UU No. 3 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia. *Lex Administratum*, 6(3).
- Hafizd, J. Z. (2020). Peran Bank Syariah Mandiri (BSM) Bagi Perekonomian Indonesia di Masa Pandemi COVID-19. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 138–148.

- Hastuti, P., Harefa, D. N., & Napitupulu, J. I. M. (2020). Tinjauan Kebijakan Pemberlakuan Lockdown, PHK, PSBB Sebagai Antisipasi Penyebaran Covid-19 Terhadap Stabilitas Sistem Moneter. Prosiding WEBINAR Fakultas Ekonomi Unimed "Strategi Dunia Usaha Menyikapi Status Indonesia Sebagai Negara Maju: Pra Dan Pasca Covid-19," 57–70.
- Indayani, S., & Hartono, B. (2020). Analisis Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Akibat Pandemi Covid-19. Perspektif: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Akademi Bina Sarana Informatika, 18(2), 201–208.
- Karin, A. F., Salsabila, C. D., Asyiffa, F., Alyssa, I., Dwiputri, M. W., Sari, N. A. L., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). Urgensi Strategi Kebijakan Pemerintah Melalui Program Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Percepatan Dampak Pandemi Covid-19. Jurnal Komunitas Yustisia, 5(3), 394–419.
- Kementerian Kesehatan, R. I. (2020). Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disesase (Covid-19). <https://infeksiemerging.kemkes.go.id/document/pedoman-pencegahan-dan-pengendalian-covid-19/view>
- Nihayah, A. Z., & Rifqi, L. H. (2022). Analisis Indikator Makro Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal STEI Ekonomi, 31(01), 18–30.
- Pakpahan, A. K., & Yoshanty, G. (2022). Diaspora Indonesia dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 18(2), 111–132.
- Putri, E. A., & Rizal, F. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Pada Masa Covid-19. Journal of Economics and Social Sciences (JESS), 1(2), 100–110.
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan Permasalahan Penyaluran Bantuan Sosial untuk Penanganan Covid-19 di Indonesia. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 2(1), 90–102.
- Rizal, F., & Humaidi, M. (2019). Dampak Makroekonomi terhadap Profitabilitas Perbankan Syariah di Indonesia. El Barka: Journal of Islamic Economics and Business, 2(2), 300–328.
- Rizal, F., & Mukaromah, H. (2021). Kebijakan pemerintah indonesia dalam mengatasi masalah pengangguran akibat pandemi Covid-19. AICOMS: Annual Interdisciplinary Conference on Muslim Societies, 1, 1–12. <https://prosiding.insuriponorogo.ac.id/index.php/aicoms/article/view/3>
- Samsul, E. M., Indriani, A., & Necayanti, N. (2021). Kebijakan Fiskal dan Moneter Indonesia serta Pengaruhnya terhadap Pasar Domestik di masa Pandemi COVID-19. Jurnal Accounting Information System (AIMS), 4(2), 46–57.
- Sriyono, S. (2013). Strategi Kebijakan Moneter di Indonesia. JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), 1(2), 111–130.
- Sudirman, I. W. (2017). Kebijakan Fiskal dan Moneter: Teori dan Empirikal. Prenada Media.
- Sugiono. (2010). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Alfabeta.
- Sukirno, S. (2019). Makroekonomi. PT RajaGrafindo Persada.

M. Veri Galih Nugroho Saputro, Miftahul Ghulam Al Fakhri

Warjiyo, P. (2017). Kebijakan Moneter di Indonesia (Vol. 6). Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.

Yonatan, S. A. (2015). Implementasi Kebijakan Makroprudensial: Satu Tujuan Berbeda Penerapan.